

**ANALISIS RENDAHNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2023**

(Tesis)

Oleh

**FRIDA AGUSTINA
NPM 2226021011**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS RENDAHNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2023

**Oleh
FRIDA AGUSTINA**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya capaian PAD Kabupaten Tanggamus pada periode 2019-2023, dengan fokus pada identifikasi faktor penyebab kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, dengan data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, dan studi dokumen. Analisis dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu kebijakan pemerintah, efisiensi administratif, kondisi sosial dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta potensi ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kabupaten Tanggamus terhadap total pendapatan daerah berada di bawah 10%, dengan persentase terendah pada tahun 2023. Temuan utama penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli (PAD), sesuai dengan yang disebutkan Halim bahwa di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh aspek kebijakan pemerintah, efisiensi administratif, pemanfaatan teknologi, kondisi sosial partisipasi masyarakat, dan potensi ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah dan efisiensi administratif menjadi faktor internal, sedangkan kondisi sosial partisipasi masyarakat dan potensi ekonomi daerah menjadi faktor eksternal. Untuk pemanfaatan teknologi dapat menjadi faktor internal dan eksternal. Kesimpulan dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor yang kurang berpengaruh adalah efisiensi administratif. Dampak dari rendahnya PAD terlihat pada tingginya ketergantungan Kabupaten Tanggamus terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai 92,35% pada tahun 2023. Ketergantungan ini juga mempengaruhi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, PAD, Faktor Penyebab

ABSTRACT

ANALYSIS OF LOW LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN TANGGAMUS DISTRICT IN 2019-2023

**By
FRIDA AGUSTINA**

Local own-source revenue is a key indicator of a region's fiscal independence in supporting the implementation of regional autonomy. This research aims to analyze the low achievement of Tanggamus Regency's own-source revenue in the 2019-2023 period, with a focus on identifying factors that cause the contribution of own-source revenue to regional income. This research used an exploratory qualitative approach, with data obtained through semi-structured interviews, and document studies. The analysis was conducted based on five main aspects, namely government policy, administrative efficiency, social conditions and community participation, technology utilization, and regional economic potential. The results showed that the contribution of Tanggamus Regency's own-source revenue to total regional revenue was below 10%, with the lowest percentage in 2023. The major finding of this research is that the factors that affecting the low local own-source revenue of Tanggamus Regency, As stated by Halim, the low PAD in Tanggamus Regency is influenced by several aspects, including government policy, administrative efficiency, technology utilization, social conditions and society participation, and the region's economic potential. Government policy and administrative efficiency are categorized as internal factors, while social conditions, society participation, and regional economic potential are considered external factors. Technology utilization can be both an internal and external factor. Among these, the most influential factors are government policy and society participation, where as administrative efficiency is found to be the least influential. The impact of low local revenue can be seen in Tanggamus Regency's high dependence of transfer funds from the central government, which reached 92.35% in 2023. This dependency limits local government flexibility in designing and implementing governance.

Keywords: Local Finance, Local Own-Source Revenue, Causative Factor

**ANALISIS RENDAHNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2023**

Oleh

**FRIDA AGUSTINA
NPM 2226021011**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS RENDAHNYA PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2019-2023**

Nama Mahasiswa : **Frida Agustina**

NPM : **2226021011**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.
NIP. 19780430 200812 1 001

Dr. Pitojo Budiono, M. Si.
NIP. 19640508 199303 2 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Maulana Mukhlis, S. Sos., M.I.P.



Sekretaris

: Dr. Pitojo Budiono, M. Si.



Penguji Utama

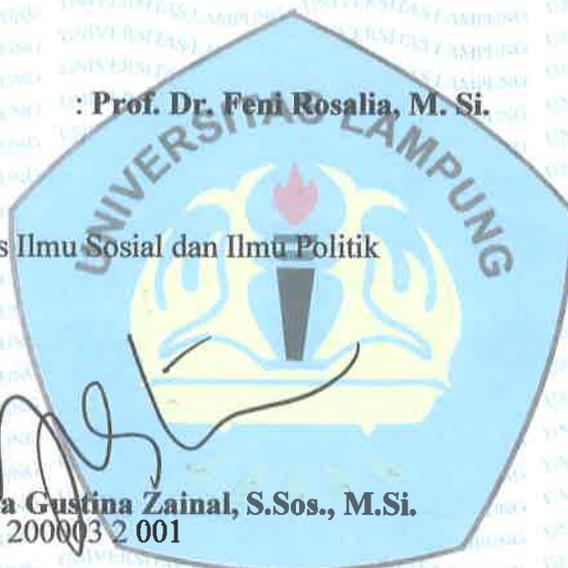
: Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si.



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP 19760821 200003 2 001



3. **Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902b1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Analisis Rendahnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Frida Agustina
NPM. 2226021011

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap **Frida Agustina**, tempat tanggal lahir Tulang Bawang Barat pada 3 Agustus 1999 tepatnya di Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak **Agus Purwoto** dan Ibu **Alenawati**. Penulis memiliki seorang adik laki-laki bernama Frima Rafid Aguslian dan adik perempuan bernama Fricylia Nabila Angelin. Penulis telah berkeluarga, suami bernama Harjuo Saputro. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2005-2011 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kagungan Ratu. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tulang Bawang Udik Tahun 2011-2014. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tumijajar Tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan menyelesaikan studi pada tahun 2021. Setelah lulus dari IPDN, sembari bekerja penulis melanjutkan studi pada Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unila di tahun 2022.

Pada awal melaksanakan Studi Magister Ilmu Pemerintahan, penulis melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibidang perbendaharaan. Selanjutnya pada akhir tahun 2022, penulis mendapatkan penugasan baru di Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dibagian perencanaan. Selama pelaksanaan tugasnya, penulis

mendapat beberapa pembelajaran dan pengalaman dibidang perencanaan dan keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan studi lanjutan yang sedang penulis tempuh pada Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Demikian beberapa riwayat sejak rentang tahun 2022 hingga 2025 Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri penulis. Harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kompetensi diri dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabd.

MOTTO

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.

(QS. An Nahl : 78)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al- Insyirah : 6)

The more you know, the more you realize you don't know

(Aristotle)

Hidup bukanlah tentang “Aku Bisa Saja” namun tentang “Aku Mencoba”.

Jangan Pikirkan tentang Kegagalan, itu adalah Pelajaran

(Ir. Soekarno)

Pengetahuan bukan tentang perolehan, namun tentang pemahaman dan manfaat.

(Frida Agustina)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hambaMu sehingga pada akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tumpah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Bapak dan Mamak Tercinta
Agus Purwoto dan Alenawati

Ayah dan Bunda Tercinta
Muchlas Ardianto dan Winnani Roniyus Putri

Suamiku Tercinta
Harjuno Saputro

Adik-Adik Tersayang
Frima Rafid Aguslian dan Fricyilia Nabila Angelin

Serta,
Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya Tesis ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul “**ANALISIS RENDAHNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2023**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Tesis ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam tesis ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M. Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.

4. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat, dan saran, baik tentang perkuliahan maupun tentang hal lainnya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan Ibu dan Ibu selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai dengan proses bimbingan tesis dari awal sampai terselesaikannya tesis ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian tesis dengan baik, selalu memberikan semangat dalam proses pembimbingan, serta penulis terkesan karena kehadiran bapak bersama keluarga pada pernikahan penulis. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas berbagai masukan dan saran yang bapak sampaikan sehingga memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT selalu melancarkan segala urusan dan selalu dalam perlindungan-Nya.
8. Segenap Dosen-dosen Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, Bapak Dr. Robi Cahyadi , Bapak Ariska Warganegara, Ph.D, Bapak Hertanto, Ph.D., dan Ibu Dr. Tabah Maryanah. Semoga Allah SWT selalu melancarkan segala urusan dan selalu dalam perlindungan-Nya.
9. Staff Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Yerri, Mba Vivi, Bang Penda, serta Mba Fitri.

10. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Keempat orang tua ku Bapak, Mamak, Bunda, dan Ayah yang sangat penulis cintai dan sayangi. Alhamdulillah dan terima kasih. Saat penulis sudah menyelesaikan studi Magister Ilmu Pemerintahan dan beribu-ribu terima kasih pun tidak sanggup untuk membalaskan keringat demi keringat yang kalian teteskan demi menghidupi putrimu agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Dengan kerendahan hati untuk meminta maaf atas semua perilaku yang tak pantas yang pernah dilakukan. Semoga setiap langkah penulis selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk bapak dan mamak. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan, rezeki, dan melindungi bapak, mamak, bunda, dan ayah. Aamiin Allahummaa Aamiin.
12. Suamiku Harjuno Saputro, terima kasih atas kepercayaan, motivasi, semangat, kesabaran dan saran yang selalu diberikan. Terimakasih untuk segala dukungan dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki perlindungan oleh Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.
13. Adik-Adikku Frima dan Fricyl, terima kasih atas doa dan dukungan kalian berdua. Salam hangat dan semangat untuk perjalanan kehidupan yang sedang dijalani. Semoga kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan dan bisa menjadi kebanggaan bapak dan mamak.
14. Untuk teman-teman Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022, Kak Putri, Tanti, Roida, Kak Dhita, Dinda, Manda, Amat, Abang Sukmi, Abang Herwin, Faishal, Harido, Abang Riza, Abang Anam, Abang Dandri, Abang Amir, Abang Etro, Abang Hendra, dan Mba Resty. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan sepenanggungan di Pascasarjana Fisip Unila. Semoga kedepannya kita sukses selalu.
15. Untuk informan penulis, terima kasih sudah mau bertukar cerita dan pikiran terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang diberikan sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga sehat

selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin.

16. Untuk sahabat terbaik penulis Lisa dan Yusi, terimakasih banyak selalu memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesuksesan dimanapun berada.
17. Terima kasih kepada diriku sendiri atas ketekunan dan kerja keras yang telah membuahkan hasil. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, penulis berhasil menyelesaikan penelitian tesis ini dengan kesungguhan. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah berikutnya.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tesis ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam san wacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa fikiran. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2025

Penulis

Frida Agustina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Desentralisasi Fiskal	17
2.2 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.....	19
2.3 Pendapatan Asli Daerah	22
2.3.1 Pajak Daerah.....	26
2.3.2 Retribusi Daerah.....	28
2.3.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	30

2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah.....	32
2.5 Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Tipe Penelitian	40
3.2 Fokus Penelitian.....	40
3.3 Penentuan Informan	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Pengolahan Data	44
3.7 Teknik Analisis Data	45
3.8 Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	46
IV. GAMBARAN UMUM	47
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tanggamus	47
4.2 Gambaran Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus	47
4.3 Gambaran Umum Lembaga Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus	64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Kinerja Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023	67
5.1.1 Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD	74
5.1.2 Rasio Derajat Desentralisasi	76
5.1.3 Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah	78
5.1.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	79
5.2 Komponen PAD di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023	82
5.2.1 Pajak Daerah.....	82
5.2.2 Retribusi Daerah.....	87
5.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	92
5.2.4 Lain-Lain PAD yang Sah.....	95
5.3 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah (PAD)	100

5.4 Dampak Rendahnya PAD Kabupaten Tanggamus Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	116
5.5 Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Meningkatkan PAD.....	118
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	115
6.1 Simpulan	115
6.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Table 1. Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota di Lampung.....	5
Tabel 2. Sumber Pendapatan Daerah dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023	6
Tabel 3. Capaian Target PAD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023.....	7
Tabel 4. Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023.....	7
Tabel 5. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023	8
Tabel 6. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023	9
Tabel 7. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 8. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	20
Tabel 9. Kriteria Penilaian terhadap Efektivitas PAD.....	33
Tabel 10. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi	34
Tabel 11. Presentasi Penilaian Terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	34
Tabel 12. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	35
Tabel 13. Informan Penelitian	42
Tabel 14. Checklist Dokumen	44
Table 15. Objek Pajak Hotel	50
Tabel 16. Objek Pajak Parkir	51
Tabel 17. Objek Pajak Hiburan	52
Tabel 18. Objek Pajak Mineral Bukan Logam.....	52
Tabel 19. Objek Pajak Air Tanah	53
Tabel 20. Objek Pajak Reklame	54
Tabel 21. Objek Pajak Restoran	59
Tabel 22 Sumber Retribusi Daerah	62
Tabel 23. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	67
Tabel 24. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020..	69
Tabel 25. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 ..	70
Tabel 26. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022 ..	71
Tabel 27. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 ..	72
Tabel 28. Perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD.....	74
Tabel 29. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi	77

Tabel 30. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	78
Tabel 31. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus	80
Tabel 32. Rincian PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023	83
Tabel 33. Rincian PAD dari Retribusi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023	88
Tabel 34. Rincian PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023	93
Tabel 35. Rincian PAD dari Lain-Lain PAD yang sah pada Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023	96
Tabel 36. Penganggaran Program Peningkatan Kualitas Aparatur pada Bapperida Tahun 2019-2023	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	40
Gambar 2. Diagram Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023	48
Gambar 3. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023.....	49

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan sesuai dengan amanat dalam Sila Kelima Pancasila, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, penting untuk memperhatikan pemerataan keadilan bagi semua warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dihadapkan pada tugas yang berat untuk menjalankan pemerintahan yang mengutamakan aspek keadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Tahwin dkk. (2013), 137)

Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang mencakup beragam unsur, baik dari segi geografis maupun aspek sosial budayanya. Keberagaman ini menciptakan perbedaan yang muncul akibat kondisi geografis dan sosial budaya yang berbeda di setiap wilayah. Perbedaan ini kemudian mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh masing-masing wilayah dalam menetapkan prioritas sesuai dengan keadaan lokalnya. Meskipun demikian, jika keragaman ini dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, setiap wilayah memiliki pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1), Indonesia sebagai Negara Kesatuan dibagi menjadi provinsi, dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Pemerintah daerah ini beroperasi berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 Ayat (5) menekankan bahwa

pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi seluas mungkin, kecuali untuk urusan yang secara khusus diatur oleh undang-undang sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dua instrumen hukum yang memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi di tingkat lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah harus mempertimbangkan potensi masing-masing daerah agar dapat dikelola secara optimal, sebagai bagian dari upaya pengelolaan keragaman dan kondisi geografis Indonesia. Menurut Kamaroellah, (2017:126) ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah memiliki kemampuan keuangan untuk mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri, serta memiliki ketergantungan yang semakin berkurang pada pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama dalam pengumpulan dana untuk pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pasal 5 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi merujuk pada pengalihan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, yang didasari oleh prinsip otonomi. Sedangkan asas dekonsentrasi melibatkan pemindahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku perwakilan pusat di daerah. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya kepada pemerintah yang memberikan tugas tersebut. Desentralisasi dianggap sebagai alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2000:21).

Dalam implementasi otonomi daerah, penting adanya pendanaan yang memadai agar pemerintah daerah dapat mengelola potensi lokal secara optimal sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menyediakan sumber-sumber pendanaan tambahan, yang dapat menjadi pendapatan alternatif berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, muncul konsep desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dari segi fiskal. Kamaroellah (2017:124) mengartikan bahwa, Desentralisasi fiskal adalah salah satu metode transfer dana dari APBN yang terkait dengan kebijakan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, diharapkan tercipta kesetaraan dalam kemampuan keuangan antar daerah yang sejalan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal berperan krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Di Indonesia, penerapan desentralisasi fiskal dilakukan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam APBN, TKDD merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan setiap tahun untuk mendukung desentralisasi fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TKDD terdiri dari dua komponen utama: Transfer ke Daerah (TKD), yang disalurkan ke provinsi dan kabupaten/kota, serta Dana Desa, yang diberikan kepada desa-desa.

Kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pendapatan, termasuk yang berasal dari pajak, retribusi, dan jenis pendapatan lain yang sah, dikenal sebagai PAD. Pengumpulan PAD dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi. PAD kemudian disetor ke kas daerah untuk

memenuhi kebutuhan lokal tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, PAD dianggap sebagai sumber ekonomi yang berasal dari wilayah setempat. Tingkat kenaikan atau penurunan PAD menjadi indikator kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan lokal adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayah itu sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan ketentuan hukum(Djaenuri, 2012). Untuk mencapai hasil pendapatan daerah yang maksimal, diperlukan kemampuan daerah untuk mengelola potensinya sendiri, terutama dalam mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap wilayah memiliki wewenang untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari PAD.

Provinsi Lampung merupakan wilayah otonom tingkat provinsi yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Lampung disesuaikan dengan kondisi daerahnya, dengan menggunakan anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini bersumber dari PAD serta dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, Provinsi Lampung masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, sehingga proporsi dana transfer ini dibandingkan dengan pendapatan asli daerah masih cukup besar. Ketergantungan pada dana transfer tersebut penting untuk membiayai urusan pemerintahan guna mencapai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Lampung terdiri dari lima belas kabupaten/kota dengan masing-masing daerahnya melaksanakan otonomi daerah yang menggunakan pendapatan daerah untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya. Sampai dengan tahun 2023, kontribusi dana transfer terhadap pendapatan masing-masing daerah di Provinsi Lampung masih diatas 50%. Berikut adalah tabel kontribusi transfer pusat terhadap pendapatan kabupaten/kota di Lampung:

Table 1. Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota di Lampung

No	Kabupaten/Kota	Total Pendapatan (ribu rupiah)	Dana Perimbangan (ribu rupiah)	Presentase (%)
1	Kota Bandar Lampung	1,576,520,000	878,760,000	55.74
2	Kota Metro	877,840,000	575,650,000	65.58
3	Kabupaten Pesawaran	964,610,000	848,770,000	87.99
4	Pringsewu	952,870,000	814,410,000	85.47
5	Tanggamus	1,484,290,000	1,370,860,000	92.35
6	Pesisir Barat	467,250,000	412,410,000	88.26
7	Lampung Barat	777,400,000	662,070,000	85.16
8	Lampung Utara	1,195,650,000	1,078,930,000	90.24
9	Lampung Tengah	1,966,020,000	1,671,050,000	85.00
10	Lampung Selatan	1,971,980,000	1,553,370,000	78.77
11	Lampung Timur	1,824,100,000	1,588,170,000	87.07
12	Tulang Bawang	925,370,000	829,550,000	89.65
13	Tulang Bawang Barat	768,390,000	666,110,000	86.69
14	Way Kanan	1,131,900,000	1,019,710,000	90.09
15	Mesuji	763,160,000	647,580,000	84.86

Sumber : diolah dari <https://djpk.kemenkeu.go.id> 2024

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, persentase kontribusi dana transfer pusat terhadap pendapatan daerahnya masih berada diatas 50%. Kemudian untuk daerah yang paling kecil persentasenya adalah Kota Bandar Lampung. Untuk daerah yang kontribusi dana transfer pusatnya terbesar adalah Kabupaten Tanggamus dengan persentase 92,35%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah yang lainnya di Kabupaten Tanggamus kontribusinya masih sangat rendah.

Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667). Dalam undang-undang tersebut Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 kecamatan yaitu, Kota Agung, Talang Padang, Wonosobo, Pulau Panggung, Pagelaran, Pringsewu, Sukoharjo,

Pardasuka, Cukuh Balak, dan Gadingrejo, Pugung. Kemudian pada tahun 2008, Kabupaten Tanggamus mengalami pemekaran daerah menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah membutuhkan pendanaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki tiga sumber pendanaan yaitu PAD, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut tabel sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus dan total pendapatannya pada tahun anggaran 2019-2023:

Tabel 2. Sumber Pendapatan Daerah dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Total Pendapatan
2019	76,050,000,000	1,436,260,000,000	199,650,000,000	1,711,960,000,000
2020	76,830,000,000	1,393,370,000,000	164,070,000,000	1,634,260,000,000
2021	95,790,000,000	1,382,260,000,000	174,080,000,000	1,652,130,000,000
2022	48,990,000,000	1,455,190,000,000	137,300,000,000	1,641,480,000,000
2023	33,920,000,000	1,370,860,000,000	79,500,000,000	1,484,290,000,000

Sumber : diolah dari <https://djpk.kemenkeu.go.id> 2024

Tabel 2 menunjukkan pendapatan daerah di Kabupaten Tanggamus paling banyak bersumber dari dana perimbangan. Dimana, dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut diatas menunjukkan bahwa PAD kontribusinya paling kecil didalam total pendapatan daerah dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Jika dilihat dari pencapaian targetnya, PAD Kabupaten tanggamus sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian Target PAD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target PAD	PAD	Persentase (%)
2019	91,930,000,000	76,050,000,000	82.73
2020	117,800,000,000	76,830,000,000	65.22
2021	131,170,000,000	95,790,000,000	73.03
2022	128,010,000,000	48,990,000,000	38.27
2023	104,660,000,000	33,920,000,000	32.41

Sumber : Diolah dari <https://djkp.kemenkeu.go.id> 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa PAD pada tahun anggaran 2019-2023 belum memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa, selain kontribusinya masih kecil terhadap pendapatan daerah, PAD juga masih belum memenuhi target dari PAD itu sendiri untuk setiap tahun anggarannya. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2019-2021 yang terdampak *covid-19* tidak berpengaruh terhadap perolehan PAD di Kabupaten Tanggamus. Terlebih jika dilihat kontribusinya terhadap belanja daerah sebagaimana tabel pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023 :

Tabel 4. Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Belanja	PAD	Persentase (%)
2019	1,678,740,000,000	76,050,000,000	4.53
2020	1,648,640,000,000	76,830,000,000	4.66
2021	1,658,190,000,000	95,790,000,000	5.78
2022	1,723,900,000,000	48,990,000,000	2.84
2023	1,425,540,000,000	33,920,000,000	2.38

Sumber : Diolah dari <https://djkp.kemenkeu.go.id> 2024

Tabel 4 menjelaskan bahwa belanja daerah Kabupaten Tanggamus untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan sangat lebih besar dari PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Tanggamus belum mampu mencukupi kebutuhan belanja daerahnya, sehingga dana transfer dari pusat masih besar persentasenya terhadap total pendapatan daerah dalam mencukupi belanja daerahnya. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023,

belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 1,6 Triliun menjadi sekitar 1,7 Triliun, kemudian pada tahun 2023 belanjanya mengalami penurunan sekitar 300 miliar diikuti dengan penurunan PAD yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Berikut adalah tabel kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Tanggamus terhadap total pendapatan daerah :

Tabel 5. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

Tahun	Total Pendapatan	PAD	Persentase (%)
2019	1,711,960,000,000	76,050,000,000	4.44
2020	1,634,260,000,000	76,820,000,000	4.70
2021	1,652,130,000,000	95,790,000,000	5.80
2022	1,641,480,000,000	48,990,000,000	2.98
2023	1,484,290,000,000	33,920,000,000	2.28

Sumber : Diolah dari <https://djpk.kemenkeu.go.id> 2024

Dari Tabel 5 Menunjukkan bahwa data kontribusi PAD Kabupaten Tanggamus dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terhadap total pendapatan daerah masih berada dipersentase dibawah 10%. Dari data tersebut, peningkatan PAD Kabupaten Tanggamus terjadi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tanggamus masih rendah baik pada masa *Covid-19* maupun pada masa transisi kondisi normal. Sehingga kondisi tersebut tidak berpengaruh pada penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Bahkan pada tahun yang dianggap sebagai transisi kenormal, PAD justru menurun.

PAD Kabupaten Tanggamus terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai sumber PAD lainnya yang sah. Rendahnya kontribusi dari PAD terlihat dari data sumber PAD Kabupaten Tanggamus yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah	Total
2019	20,570,000,000	1,540,000,000	4,280,000,000	49,660,000,000	76,050,000,000
2020	22,110,000,000	2,160,000,000	4,450,000,000	48,100,000,000	76,820,000,000
2021	19,170,000,000	2,130,000,000	5,840,000,000	68,650,000,000	95,790,000,000
2022	24,670,000,000	1,300,000,000	5,237,000,000	39,893,000,000	48,990,000,000
2023	20,920,000,000	1,900,000,000	3,310,000,000	7,790,000,000	33,920,000,000

Sumber : Diolah dari <https://djpk.kemenkeu.go.id> 2024

Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa rendahnya kontribusi PAD dapat diamati melalui berbagai sumber pendapatan asli daerah yang tercantum. Sumber pendapatan asli daerah dari pajak daerah mengalami kenaikan dan penurunan pada tiap tahun anggarannya. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022. Untuk retribusi daerah untuk tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan pada tiap tahunnya, sehingga perlu adanya strategi sebagai usaha guna meningkatkan retribusi daerah. Kemudian untuk sumber pendapatan asli daerah yang lainnya tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan, dikarenakan untuk tahun 2023 masih tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masalah seperti kontribusi PAD yang rendah dapat mempengaruhi kapasitas keuangan suatu daerah. Jika masalah ini tidak segera diatasi, pemerintah Kabupaten Tanggamus bisa dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam upaya meningkatkan PAD dengan tujuan akhir meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan PAD agar kemampuan keuangan daerah dapat meningkat dalam menjalankan otonomi daerah.

Dalam rangka memberikan dasar referensi untuk penelitian ini, peneliti akan menyertakan berbagai penelitian terdahulu dan memiliki relevansi dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ma'ruf Akib, Wahyu Umar, dan Marjani	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Di Kota Kendari	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan tingkat kepatuhan di antara wajib pajak, diperlukan penilaian mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut serta penerapan strategi yang efektif untuk meningkatkannya. Beberapa strategi yang disarankan mencakup pemanfaatan teknologi informasi, analisis data dan pemodelan, penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi pajak dan retribusi dapat memberikan manfaat positif seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan investasi di wilayah tersebut. Namun, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, praktik korupsi, ketidakjelasan peraturan, tingginya tarif pajak dan retribusi, serta masalah teknis dalam penerapan sistem informasi. Oleh karena itu, menemukan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting guna memastikan optimalisasi pajak dan retribusi yang efektif, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kendari.
Aris Adi Prasetyo, Virgiana Nugransih Siwi, Eranus Yoga Kudhani (Prasetyo dkk., 2019.)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Dengan menerapkan Model Fixed Effect, penelitian ini mengidentifikasi bahwa PDRB dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PAD. Sebaliknya, inflasi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap PAD. Sementara itu, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap PAD.
Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumastuti, dan Iyeh Supriatna (Latifah Humairah &	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung belum sepenuhnya mematuhi SOP, peraturan, dan ketentuan yang ada. Beberapa aspek pengelolaan yang sudah diterapkan masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan,

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Negeri Bandung, 2021)	Daerah Kota Bandung)	sehingga penerimaan retribusi belum mencapai target yang diharapkan.
Mei Rezki Dwi Inggawati, Ngadiman, dan Muhtar (Rezki dkk., 2013 .)	Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik menurut lima indikator yang digunakan. Dari kelima indikator tersebut, strategi peningkatan pengawasan melalui penerapan Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR) dianggap paling efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Strategi ini juga didukung oleh berbagai inisiatif lain, seperti sosialisasi kepada pedagang dan pelatihan teknis untuk petugas pungut, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
Susilawati (Susilawati, 2018)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Palembang	Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan, antara lain: fokus pada intensifikasi penerimaan pajak yang belum mencapai target, mengembangkan potensi pendapatan daerah dengan mengeksplorasi jenis objek pajak baru, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana untuk pelayanan pajak secara online, serta menerapkan sistem penghargaan dan hukuman bagi aparaturnya.
Andy Kurniawan (Kurniawan, 2019)	Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung)	Pengelolaan retribusi daerah yang efektif, sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, merupakan strategi penting untuk mengoptimalkan pendapatan dan mendukung pembangunan daerah. Strategi ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah dan mencerminkan kemandirian daerah. Analisis mendalam terhadap kondisi dan perkembangan penerimaan retribusi daerah dapat mengungkap masalah yang ada. Empat teknik analisis yang diterapkan analisis pertumbuhan, kontribusi, kinerja, dan analisis ini menghasilkan pemahaman mengenai objek retribusi yang mengalami tingkat kebocoran tinggi. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan akan memberikan rekomendasi konkret untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah, yang merupakan aspek penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung..
Nadya Fazriana Haniz, Hadi	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak wajib pajak, pendapatan per kapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Sasana (Haniz & Sasana, 2013)	Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal	pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, yang berarti semakin banyak wajib pajak, semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah. Pendapatan per kapita juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, artinya tingkat inflasi tidak memengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

Dari tabel 7, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ma'rif Akib dkk yang berjudul "Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Di Kota Kendari" dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Untuk penelitian ini fokus meneliti rendahnya PAD di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2019-2023 dengan pendekatan kualitatif eksploratif, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang mendalam dan menganalisis masalah tersebut secara sistematis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ma'rif Akib dkk fokus pada strategi atau metode peningkatan PAD dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu wawancara dan dokumentasi. Selain terdapat perbedaan, jurnal ini juga dapat memberikan kontribusi pada penelitian yang akan dilakukan dalam hal memberikan wawasan tentang strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan PAD berdasarkan analisis masalah yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Adi Prasetyo dkk yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah tahun 2010-2018" memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada pendekatannya, penelitian yang dilakukan oleh Aris Adi Prasetyo dkk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada

pengaruh beberapa variabel ekonomi dan demografis terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan mengevaluasi berbagai faktor yang dapat meningkatkan PAD secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada pajak daerah tetapi juga mencakup retribusi dan aspek manajerial lainnya. Selain terdapat perbedaan, jurnal ini juga dapat memberikan kontribusi pada penelitian yang akan dilakukan dalam memperkuat argumen bahwa peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu kunci dalam strategi optimalisasi PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Usivianti Latifa Humaira dkk yang berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)” memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang terletak pada fokus penelitiannya. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Usivianti Latifa Humaira dkk berfokus pada pengelolaan retribusi parkir yang menjadi strategi dalam peningkatan PAD di Kota Bandung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian yang akan dilakukan sebagai referensi untuk mengetahui kendala dan masalah yang mempengaruhi salah satu unsur pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mei Rezki Dwi dkk yang berjudul “Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)” memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang terletak pada fokus penelitiannya. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Mei Rezki Dwi dkk berfokus pada pengelolaan retribusi yang menjadi strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian yang akan dilakukan sebagai referensi untuk mengetahui kendala dan masalah yang mempengaruhi salah satu unsur pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati yang berjudul “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang” memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang terletak pada fokus penelitiannya. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Susilawati berfokus pada pengelolaan pajak hiburan yang menjadi strategi dalam peningkatan PAD di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian yang akan dilakukan sebagai referensi untuk mengetahui kendala dan masalah yang mempengaruhi salah satu unsur pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Kurniawan yang berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung” memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang terletak pada fokus penelitiannya. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Andy Kurniawan berfokus pada pengelolaan retribusi yang menjadi strategi dalam peningkatan PAD di Kabupaten Tulungagung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian yang akan dilakukan sebagai referensi untuk mengetahui kendala dan masalah yang mempengaruhi salah satu unsur pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Fazriana Haniz dan Hadi Sasana yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal” memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang terletak pada fokus penelitiannya. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Susilawati berfokus pada pengelolaan pajak dari aspek wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada penerimaan pajak yang menjadi strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten

Tanggamus secara keseluruhan tidak hanya berkaitan dengan pajak. Penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian yang akan dilakukan sebagai referensi untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi salah satu unsur pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peningkatan pendapatan asli daerah, dengan judul “**Analisis rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu faktor apa yang menyebabkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019-2023 rendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengeksplorasi faktor yang menyebabkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023 rendah.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang disimpulkan dengan adanya penelitian ini sebagai berikut adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada strategi pemerintah, terutama dalam peningkatan PAD di Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahkan pedoman

untuk melakukan penelitian lainnya dikemudian hari khususnya penelitian terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang bermanfaat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola keuangan dan perencanaan serta penganggaran daerah Kabupaten Tanggamus sehingga perencanaan penganggaran dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dapat lebih baik. Selain itu terdapat manfaat lainnya dari penelitian ini , yaitu:

1. Manfaat untuk Peneliti

Penelitian dapat memberikan informasi sebagai pengetahuan bagi penulis dalam hal mengetahui indikator yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah.

2. Manfaat untuk Masyarakat

Penelitian dapat memberikan informasi sebagai pengetahuan bagi masyarakat dalam hal mengetahui potensi sumberdaya yang dapat menjadi pendapatan daerah, serta memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dari segi fiskal. Menurut Kamaroellah (2017), Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mentransfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara, dengan tujuan mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, diharapkan adanya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada daerah otonom. Menurut Halim (2001:167), terdapat ciri-ciri utama yang menandakan bahwa suatu daerah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi fiskal, meliputi :

- 1 Kemampuan keuangan daerah mengindikasikan bahwa suatu daerah harus mampu mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri, serta memanfaatkan keuangannya sendiri. Ini penting agar daerah dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri dan efektif.
- 2 Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat harus dikurangi, sehingga PAD perlu menjadi sumber utama keuangan. Untuk mencapainya, diperlukan dukungan dari kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Bahl dalam Hendrikus, desentralisasi fiskal berjalan dengan baik jika mencakup hal-hal berikut:

3. Desentralisasi Fiskal sebagai Sistem Komprehensif: Sistem desentralisasi fiskal harus dianggap sebagai suatu sistem yang menyeluruh, di mana pemda memiliki wewenang yang cukup untuk menggalang penerimaan, adanya otonomi anggaran, dan transfer tanpa syarat dari pemerintah pusat.
4. Uang Mengikuti Fungsi (Money Follow Function): Penentuan tanggung jawab pengeluaran harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan tanggung jawab penerimaan.
5. Kemampuan Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi.
6. Sistem Antar Pemerintah yang Berbeda: Diperlukan sistem yang berbeda untuk sektor perkotaan dan sektor perdesaan.
7. Kewenangan Mengelola Pajak: Desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan yang besar bagi pemda dalam mengelola pajak.
8. Kepatuhan pada Aturan: Pemerintah pusat harus mematuhi aturan-aturan desentralisasi fiskal yang telah ditetapkan.
9. Kesederhanaan: Sistem desentralisasi fiskal harus mempertahankan kesederhanaan.
10. Desain Sistem Transfer: Desain sistem transfer antar pemerintah seharusnya selaras dengan tujuan reformasi desentralisasi.
11. Tingkatan Pemerintahan: Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan tingkatan pemerintahan yang ada.
12. Batas Anggaran yang Ketat: Diperlukan penerapan batas anggaran yang ketat dalam desentralisasi fiskal.
13. Pelopor Desentralisasi Fiskal: Harus ada pihak yang menjadi pelopor dalam proses desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal dalam analisis penelitian ini dimaknai sebagai kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber pendanaan dalam rangka melaksanakan urusan yang diserahkan kepada daerah secara maksimal sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.2 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara keduanya. Sistem ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan sesuai dengan undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu:

- 1 Fungsi alokasi mencakup penyediaan sumber daya ekonomi berupa barang dan jasa untuk pelayanan masyarakat.
- 2 Fungsi distribusi melibatkan pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan.
- 3 Fungsi stabilisasi mencakup upaya untuk menjaga kestabilan pertahanan dan keamanan, stabilitas ekonomi dan moneter, serta aspek lainnya.

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 meliputi;

- 1 Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi
Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi melalui berbagai langkah penguatan, termasuk restrukturisasi jenis pajak, penambahan sumber-sumber pajak daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, serta penyesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2 Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD)

Pemerintah pusat mengatur pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, serta mendorong daerah agar lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dengan cara yang efisien dan disiplin..

3 Pengelolaan Belanja Daerah

Undang-Undang mengatur pengelolaan belanja daerah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan tentang pemberian kewenangan keuangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 8. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kriteria	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi	Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kabupaten/Kota: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD)	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan kebijakan dan regulasi terkait transfer ke daerah 	Provinsi :

Kriteria	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola berbagai jenis transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH) • Pengawas dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai perantara antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota • Mengawasi dan memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer • Bertanggung jawab untuk menyusun laporan penggunaan dana transfer yang dikirimkan ke pemerintah pusat <p>Kabupaten/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan dana sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat • Menyusun rencana anggaran tahunan yang mencakup penggunaan dana transfer dan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada pemerintah provinsi • Mematuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam penggunaan dana transfer
Pengelolaan Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur belanja daerah • melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap belanja daerah untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan • menetapkan prioritas pembangunan nasional yang mempengaruhi alokasi anggaran ke daerah 	<p>Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membantu koordinasi dan pembinaan dalam pengelolaan belanja daerah di kabupaten/kota, memastikan bahwa belanja sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional serta regulasi yang berlaku • menerima laporan tentang belanja daerah dari kabupaten/kota dan meneruskan laporan tersebut ke pemerintah pusat <p>Kabupaten/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyusun anggaran tahunan dan mengelola belanja untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal

Kriteria	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban belanja yang transparan dan akurat • mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku

Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan nilai kekayaan bersih milik daerah yang telah dianggarkan dalam susunan APBD dalam suatu periode. Pendapatan daerah sebagai bentuk penerimaan daerah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi daerah. Sebagaimana pernyataan tersebut, maka pendapatan daerah telah dianggarkan dalam susunan APBD berdasarkan perkiraan yang terperinci dan dapat terukur secara rasional berdasarkan capaian untuk setiap sumber pendapatan.

Menurut Halim (2008) pendapatan daerah mencakup semua penerimaan yang masuk ke Kas Umum Daerah dan menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini merupakan hak pemerintah daerah, diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih, dan tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah daerah.

Menurut Darise (2006), pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang diterima oleh rekening kas umum daerah dan menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode tahun anggaran yang relevan. Pendapatan ini merupakan hak pemerintah daerah, diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih, dan tidak memerlukan pengembalian oleh pemerintah daerah.

Pendapat tersebut dapat menunjukkan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah pada periode tahun anggaran tertentu. Penerimaan tersebut akan menambah kekayaan dari suatu daerah sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membayar kembali, karena masih dikategorikan sebagai hak daerah. Menurut Elsy

(Mardiasmo, 2002) Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, namun secara garis besarnya dikelompokkan dalam beberapa sumber penerimaan yaitu: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu; Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan; Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonomi, bantuan pembangunan, penerimaan lain-lain pendapatan yang sah; Pinjaman daerah terdiri dari: pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri, pinjaman luar negeri.

Menurut Halim (2004), PAD adalah salah satu komponen penerimaan daerah, selain dari dana transfer dan sumber pendapatan sah lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mencakup, antara lain, PAD, dana transfer, dan pendapatan sah lainnya. Halim (2004) menyebutkan bahwa PAD meliputi semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi internal daerah. Sementara itu, Djaenuri (2012) menjelaskan bahwa sumber-sumber PAD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah
2. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersumber dari :
 - a. Hasil penjualan barang milik daerah
 - b. Jasa giro
 - c. Sumbangan pihak ketiga
 - d. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
 - e. Sektor kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga
 - f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah
 - g. Angsuran atau cicilan kendaraan bermotor dan sebagainya
 - h. Penerimaan dari revolving
 - i. Penerimaan tunggakan pajak/retribusi, dan sebagainya.

Menurut Adisasmita (2011) bahwa “PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri dan perlu ditingkatkan secara maksimal untuk mencapai kemandirian lokal yang lebih baik”. Oleh karena itu PAD mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Berkaitan dengan otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu dalam menambah pendapatan asli daerah melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi dan diharapkan tidak banyak bergantung terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat karena dengan adanya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat yang tinggi tentu saja mengurangi arti otonomi daerah tersebut, esensi otonomi daerah pada hakikatnya adalah kemandirian daerah dalam pembiayaan kegiatan operasional dan pembangunan daerah. Namun kenyataannya, sebagian besar daerah otonom masih belum mampu mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya karena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki. Menurut Halim (Halim, 2004) ada beberapa penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

1. Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi
2. Badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
4. Adanya kebocoran-kebocoran
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah serta tidak dilakukan perhitungan potensi.

Pendapat tersebut menjelaskan mengenai adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dikarenakan oleh berlimpahnya sumber pendapatan kabupaten/ kota yang besar tetapi dikeruk oleh instansi yang lebih tinggi yang menyebabkan terjadinya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan yang

tinggi. Selain itu juga hal yang menjadi penyebab rendahnya PAD ialah pada perusahaan daerah (BUMD) belum menyumbangkan keuntungan yang besar pada Pemerintah Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dijelaskan dalam (Darise, 2006) terbagi atas tiga jenis yaitu:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dalam konteks keuangan daerah, perusahaan daerah memiliki dampak signifikan terhadap keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan, kontribusi perusahaan daerah tercermin melalui bagian laba yang disetorkan kepada pemerintah daerah dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, alokasi dana dari kas daerah untuk perusahaan daerah dalam menjalankan aktivitas usahanya dapat mempengaruhi anggaran daerah. Selain itu, terdapat masalah terkait dengan pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan retribusi daerah yang masih kurang. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam melunasi pajak dan retribusi disebabkan oleh biaya pungut yang tinggi serta tidak adanya perhitungan potensi PAD yang optimal.

PAD memiliki peranan krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2002) diharapkan pemerintah dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari pusat, sehingga memperkuat otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Selanjutnya, Adisasmita (2011:2) menekankan bahwa PAD, sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah, harus ditingkatkan secara maksimal untuk mencapai kemandirian lokal. Dengan demikian, PAD sangat penting dalam mendukung dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Berkaitan dengan otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya baik melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak banyak bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat karena dengan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat tentu saja mengurangi arti otonomi daerah tersebut, karena esensi otonomi daerah pada hakikatnya adalah kemandirian daerah dalam pembiayaan kegiatan operasional dan pembangunan daerah Djaenuri (2012).

Dari uraian diatas dapat menjelaskan hal-hal yang menjadi penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber pendapatan kabupaten/kota sebenarnya cukup melimpah namun dikelola oleh instansi yang lebih tinggi sehingga berakibat pada meningkatnya sentralisasi dalam sektor perpajakan. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Selain itu, biaya hidup yang semakin tinggi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat rendah, kemudian tidak dilakukan perhitungan potensi PAD, selanjutnya hal yang menjadi penyebab rendahnya PAD ialah pada perusahaan daerah (BUMD) yang belum berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2.3.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi yang diwajibkan oleh undang-undang kepada individu atau badan secara paksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai berbagai program kerja. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.:

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi:

- 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3 Pajak Alat Berat (PAB)
- 4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 5 Pajak Air Permukaan (PAP)
- 6 Pajak Rokok
- 7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/ Kota:

- 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- 4 Pajak Reklame;
- 5 Pajak Air Tanah (PAT);
- 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- 7 Pajak Sarang Burung Walet;
- 8 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- 9 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB).

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Strategi untuk meningkatkan pajak daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor penting, seperti peraturan perundang-undangan, aparatur pajak, wajib pajak, dan faktor sosial ekonomi. (Sriyana, 1999) menyoroti bahwa jumlah penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. (Wantara, 1997) menambahkan bahwa jumlah wisatawan, baik asing maupun domestik, juga memengaruhi penerimaan pajak. Selain itu,

Prakoso (2005) menyebutkan bahwa dalam pemungutan pajak, jumlah subjek dan objek pajak berperan dalam menentukan hasil penerimaan pajak.

2.3.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Subjek retribusi mencakup individu atau badan yang menggunakan atau menikmati layanan barang, jasa, dan/atau izin. Sementara itu, wajib retribusi adalah individu atau badan yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk pihak yang ditunjuk untuk memungut retribusi tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis-jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Kebersihan
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- d. Pelayanan Pasar
- e. Pelayanan Lalu Lintas

Jenis pelayanan yang dapat dikenakan retribusi oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha seperti pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya.

- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila.
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan.
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta optimalisasi aset daerah tanpa mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan tersebut dapat bebas dari retribusi jika potensi penerimaannya dianggap rendah atau jika dilakukan sebagai bagian dari kebijakan untuk memberikan layanan secara gratis. Retribusi untuk jenis pelayanan yang melibatkan pemberian izin tertentu mencakup persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan.

Menurut Tilawatil 2014, faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi daerah adalah Sumber Daya Manusia, pengelolaan retribusi, regulasi, dan pengawasan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud mencakup individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja, menyediakan jasa atau usaha, serta melakukan aktivitas yang memiliki nilai ekonomi, yaitu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. SDM ini juga melibatkan indikator yang mendukung pencapaian tujuan, seperti amanah, profesionalisme, tanggung jawab, kemandirian, kreativitas, disiplin, kepedulian, penghargaan terhadap orang lain, dan komitmen untuk belajar sepanjang hayat. Pengelolaan retribusi, di sisi lain, adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang

bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini terkait dengan retribusi daerah.

Regulasi yang dimaksud adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh individu baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan retribusi di daerah. Pengawasan dalam penerimaan retribusi merupakan upaya untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam waktu yang ditentukan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan. Berdasarkan pengamatan tersebut, tindakan perbaikan dapat diambil untuk memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan.

2.3.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Menurut Aris (Prasetyo dkk., 2019), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup, antara lain, bagian dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan ini dikelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaannya. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba dalam penyertaan modal terhadap perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba dalam penyertaan modal terhadap perusahaan milik Negara/BUMN
- c. Bagian laba dalam penyertaan modal terhadap perusahaan milik swasta maupun kelompok usaha masyarakat

Menurut pendapat Aris (Prasetyo dkk., 2019) faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya penyertaan modal BUMD/BUMN
- b. Pengelolaan BUMD
- c. Pengawasan pengelolaan BUMD/BUMN

Dari faktor tersebut dapat diketahui penyebab yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan daerah dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Aris (Prasetyo dkk., 2019), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan yang tidak termasuk dalam retribusi daerah atau pajak daerah, serta meliputi kategori lain-lain milik pemerintah daerah yang sah. Ini mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bentuk penerimaan ini termasuk denda atas keterlambatan pekerjaan, bunga dari deposito, penerimaan dari giro dan jasa, serta kompensasi atas kehilangan atau kerusakan kekayaan daerah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kategori pendapatan asli daerah meliputi:

- a. Pendapatan bunga
- b. Komisi potongan maupun bentuk lain yang disebabkan oleh penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh Pemerintah Daerah
- c. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- d. Jasa/Giro
- e. Hak penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah. Sebagaimana menurut Halim (2007:230) bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Menilai sejauh mana kemandirian keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan pendapatan daerah.
3. Mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerah yang ada untuk belanja.
4. Mengukur kontribusi dari setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah.
5. Menganalisis pertumbuhan atau perkembangan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan antara lain (Halim, 2004):

1) Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah. Dengan kata lain, nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dapat dihitung menggunakan perhitungan rasio keuangan sebagai berikut menurut pendapat Halim (2008):

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Umumnya, kriteria presentase efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 9. Kriteria Penilaian terhadap Efektivitas PAD

Presentase (%)	Kriteria
< 75	Tidak Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber : (Halim 2004)

2) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah PAD dan total pendapatan daerah menggambarkan rasio derajat desentralisasi. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, dengan semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai otonomi daerah.. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio derajat desentralisasi sebagai berikut (Halim, 2008):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Penilaian derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat dari jumlah PAD; semakin tinggi PAD, semakin kuat derajat desentralisasi fiskal daerah tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah PAD, semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula derajat desentralisasi di suatu daerah, yang menandakan penurunan ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Tabel 10. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Presentase	Kriteria
00 – 10,00	Sangat Kurang
0,01 – 20,00	Kurang
0,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : (Halim 2004)

3) Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan mengukur sejauh mana daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 11. Presentasi Penilaian Terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase (%)	Kriteria Ketergantungan
00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Cukup Rendah
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : (Halim 2004)

4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu menanggung biaya untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dengan mengandalkan pendapatan dari pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Rasio ini juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi, yang

merupakan elemen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu: bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi ataupun hibah. Rumus yang digunakan adalah (Halim, 2004):

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 12. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : (Halim 2004)

Berdasarkan tabel tersebut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam (Halim 2004) memperkenalkan pola hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif Pada pola hubungan ini peran pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sementara pemanfaatan dana dari PAD masih sangat terbatas. Akibatnya, penilaian terhadap kemandirian daerah masih rendah, dan daerah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah secara efektif.
2. Pola Hubungan Konsultatif Pada pola hubungan ini peran pemerintah pusat dalam membiayai daerah sudah sedikit berkurang karena daerah sudah sedikit mampu dalam membiayai daerahnya sendiri, dengan

artian bahwa campur tangan pemerintah pusat tidak sebesar pola hubungan instruktif.

3. Pola Hubungan Partisipatif Pada pola hubungan ini daerah hampir dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga peran dana dari pemerintah pusat tidak lagi begitu penting.
4. Pola Hubungan Delekatif pada pola hubungan delegatif menunjukkan bahwa daerah telah berhasil menjalankan otonomi daerah secara penuh tanpa intervensi dari pemerintah pusat

Pengukuran kinerja keuangan memiliki hubungan yang erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengukuran ini memberikan informasi penting tentang seberapa baik pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangannya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan PAD. Berikut adalah hubungan antara pengukuran kinerja keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD (Halim, 2004) :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan membantu menilai efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam menentukan arah dan kapasitas fiskal suatu daerah. Kebijakan ini mencakup peraturan mengenai jenis dan tarif pajak daerah, retribusi, serta insentif fiskal. Indikator utama yang mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal adalah rasio kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah, dan rasio desentralisasi fiskal, yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhannya tanpa tergantung pada transfer pusat. Selain itu, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan untuk mendukung pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal.

2. Efisiensi Administratif

Pengukuran kinerja keuangan, seperti rasio efisiensi PAD, menunjukkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Efisiensi administratif mencerminkan bagaimana kemampuan institusi pengelola PAD dalam menggunakan sumber daya secara hemat namun optimal. Faktor ini dapat diukur melalui rasio efisiensi PAD, yaitu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah dengan jumlah PAD yang berhasil dikumpulkan. Rasio ini memberi gambaran apakah kegiatan pemungutan dilakukan secara efisien. Selain itu, indikator lain seperti waktu rata-rata pelayanan, jumlah tenaga administrasi, turut mencerminkan tingkat efisiensi institusional. Efisiensi yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah memaksimalkan pendapatan dengan biaya yang relatif rendah.

3. Kondisi Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Pengukuran kinerja keuangan dapat mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung PAD, misalnya melalui rasio efektivitas PAD yang mengukur apakah target pendapatan yang direncanakan tercapai. Tingkat keberhasilan pengumpulan PAD juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan tingkat partisipasi masyarakat. Rasio efektivitas PAD menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target PAD tercapai. Hal ini berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak lokal, kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak, serta keaktifan dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah daerah. Di daerah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, pengumpulan PAD cenderung lebih mudah dan stabil. Masyarakat yang merasa terlibat dalam pembangunan cenderung lebih kooperatif dalam membayar pajak daerah.

4. Pemanfaatan Teknologi

Pengukuran kinerja keuangan juga dapat menunjukkan seberapa baik teknologi telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memainkan peran penting dalam modernisasi sistem pengelolaan PAD. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), e-payment, serta pelayanan berbasis digital telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi mencakup jumlah transaksi digital, tingkat penerimaan PAD melalui sistem elektronik, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital. Teknologi memungkinkan transparansi, meminimalisir kebocoran, serta mempercepat proses pelayanan pajak dan retribusi daerah.

5. Potensi Ekonomi Daerah

Pengukuran kinerja keuangan dapat mengidentifikasi apakah potensi ekonomi daerah telah dimanfaatkan secara optimal. Potensi ekonomi daerah merupakan modal dasar dalam menciptakan PAD yang berkelanjutan. Semakin besar potensi ekonomi yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang daerah untuk meningkatkan PAD-nya. Indikator yang biasa digunakan antara lain rasio pertumbuhan PAD, tingkat realisasi dibandingkan potensi, serta kontribusi sektor unggulan terhadap PAD. Selain itu, jumlah investasi daerah, serta tingkat pemanfaatan objek pajak dan retribusi menjadi ukuran seberapa optimal pemerintah daerah menggali potensi lokal. Pemanfaatan yang baik terhadap sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, atau industri kreatif dapat mendorong peningkatan PAD secara signifikan.

Faktor-faktor tersebut terdapat faktor yang menjadi pengaruh rendahnya PAD yang berasal dari dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal ini merupakan faktor internal yang mempengaruhi rendahnya PAD. Selain itu, terdapat faktor yang berpengaruh namun berasal dari luar pengelola pendapatan daerah. Faktor ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya PAD.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan alat yang penting untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, efisiensi administratif,

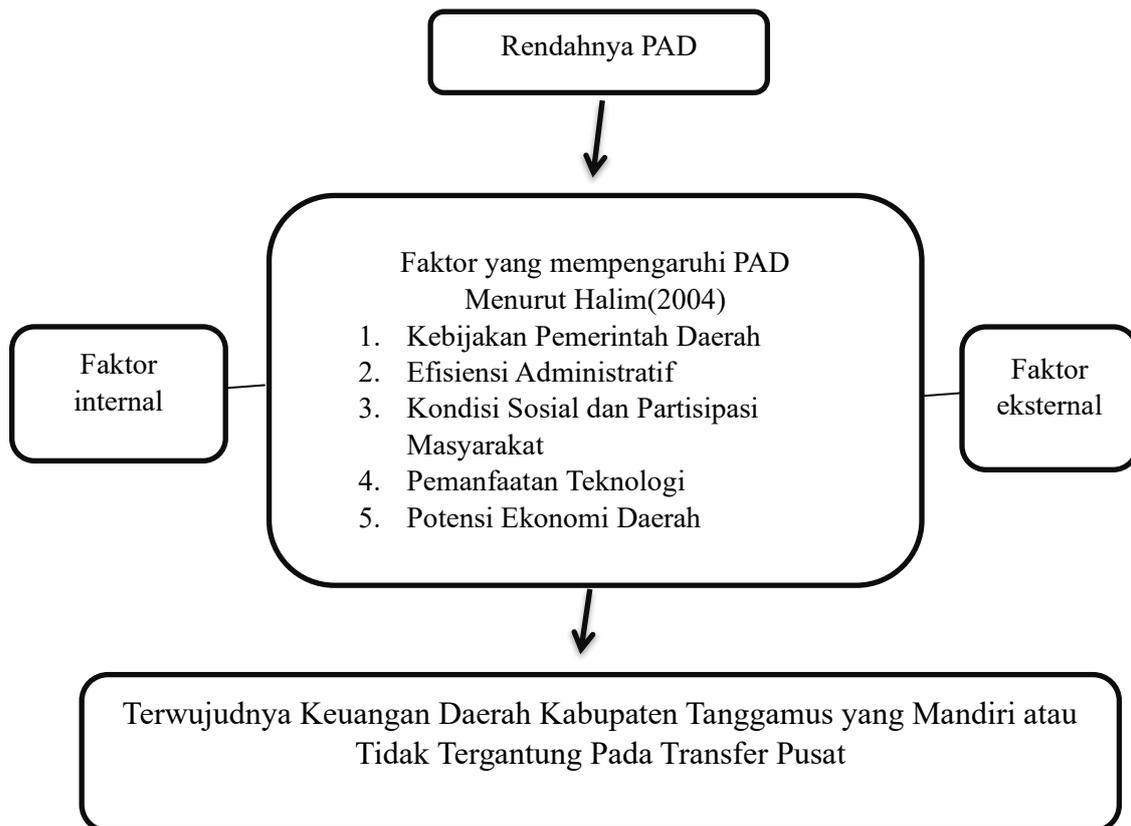
partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi mempengaruhi PAD. Dengan pengukuran ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan PAD, serta memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi daerah, tetapi juga pada berbagai aspek kebijakan, administratif, sosial, dan teknologi yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

2.5 Kerangka Pikir

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar daerah lebih memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya. Namun ketika tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah ini belum tercapai secara maksimal dan pada kenyataannya daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat itulah yang menjadi permasalahan. Ketergantungan tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penerimaan keuangan daerah masih sangat rendah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, daerah telah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sebagai bentuk desentralisasi fiskal di daerah. Daerah dapat dikatakan mampu dalam menjalankan otonomi ketika daerah tersebut mampu menggali sumber potensi daerah sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mampu mengelola keuangan sendiri untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan analisis kinerja keuangan daerah guna mengetahui faktor yang menyebabkan capaian Pendapatan Asli Daerah masih rendah. Dari analisis ini diharapkan dapat menentukan strategi sebagai upaya yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Terdapat referensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah melalui rasio keuangan, dari pengukuran rasio keuangan tersebut dapat dilihat faktor yang menyebabkan pendapatan asli daerah masih rendah dilihat dari faktor kebijakan pemerintah daerah, efisiensi administratif,

kondisi sosial dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan potensi ekonomi daerah. Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan daerah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat khususnya dalam hal finansial. Untuk lebih jelasnya, berikut alur dari kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada dasarnya merupakan proses penelitian untuk menemukan sesuatu yang ingin diketahui. Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan keadaan yang ada dan terkait dalam atau dangkalnya penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi induktif, yang bertujuan untuk menganalisis masalah berdasarkan kondisi nyata secara sistematis (Creswell & Poth, 2013). Penelitian ini bersifat eksploratif, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan sesuai kebutuhan penelitian (Neuman, 2013), sehingga dapat menunjang penelitian permasalahan rendahnya PAD di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023.

3.2 Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu gambaran mengenai konteks yang berkaitan dalam menentukan fokus suatu penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian menjadi acuan dalam mencari data dan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Fokus yang jelas dan relevan dalam lingkup penelitian bertujuan untuk mengetahui data yang harus dikumpulkan dan data tidak relevan yang tidak harus dikumpulkan. Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh aspek yang akan diteliti dari objek tertentu sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, guna mempermudah dalam penyusunan usulan penelitian dan tentunya membatasi penelitian agar tetap pada sasaran perencanaan penelitian yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup

diuraikan dalam variabel, dimensi/subvariabel dan indikator masalah yang akan diteliti. Melalui ruang lingkup, dapat memberikan penjelasan tentang fokus penelitian menyangkut aspek-aspek yang akan diteliti untuk mengetahui segala permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan desain penelitian yang telah disusun, maka penelitian ini fokus pada analisis faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023 dilihat dari indikator kebijakan pemerintah daerah, efisiensi administratif, kondisi sosial dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan potensi ekonomi daerah (Halim, 2004).

3.3 Penentuan Informan

Informan merupakan sumber data primer dalam suatu penelitian. Penentuan informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan metode ini penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara menilai seorang ahli untuk menentukan informasi yang dibutuhkan (Neuman, 2013). Dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan merupakan pejabat yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu:

Tabel 13. Informan Penelitian

No	Informan
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
3	Kepala Bidang Penetapan, Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
5	Kepala Bidang Perencanaan Pendanaan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
6	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus

Sumber : diolah penulis, 2024

Narasumber wawancara dalam penelitian ini terdapat tujuh pejabat yang menangani bidang keuangan dan perencanaan. Proses wawancara dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian sehingga pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber bisa berkembang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data terdiri dari sekumpulan kejadian atau peristiwa yang belum melalui proses pengolahan, seringkali sulit dipahami oleh peneliti, sehingga diperlukan pengolahan untuk menjadi informasi yang memiliki makna. Jenis data mencakup kata, suara, karakter, simbol, atau angka yang dapat diolah menjadi pengetahuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua data, yaitu primer dan sekunder (Neuman, 2006):

1. Data Primer

Data primer adalah informasi paling utama yang didapat secara langsung dari sumber aslinya di lokasi penelitian melalui proses wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data yang menjadi informasi paling utama adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Tanggamus dan hasil dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang diperoleh dari sumber lainnya dalam bentuk dokumen seperti brosur, literatur, dan tulisan para ahli yang diyakini dan dianggap relevan dengan isu penelitian. Data sekunder juga bisa didapat dari berbagai dokumen yang berupa data pendukung dari Renstra, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan data statistik BPS.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang penting dalam penelitian, karena yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian adalah memperoleh data. Untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan permasalahan dari judul penelitian “ Analisis Rendahnya Rendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023” penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *interview* / wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara semi-terstruktur, yang melibatkan penggunaan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai topik tertentu. Meskipun wawancara dilakukan secara sistematis dan konsisten, pewawancara memiliki kebebasan untuk menambahkan pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi yang ada (Creswell and Poth 2013).

Penelitian ini menggunakan dua instrumen penelitian yaitu, pedoman wawancara dan *checklist* dokumen. Untuk pedoman wawancara dapat berkembang sesuai kebutuhan sebagaimana penelitian ini menggunakan

wawancara semi-terstruktur. Kemudian untuk *checklist* dokumennya sebagai berikut:

Tabel 14. Checklist Dokumen

Dokumen	Kebijakan Penda	Efisiensi Administratif	Kondisi Sosial dan Partisipasi Masyarakat	Pemanfaatan Teknologi	Potensi Ekonomi Daerah
LRA	✓	✓			
LKPJ		✓		✓	
RENSTRA	✓		✓	✓	✓

Sumber : diolah penulis, 2024

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk mengolah data hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus dalam memberikan penjelasan dan pengkajian lebih lanjut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu (Neuman, 2006):

1. Editing

Editing merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang sudah diperoleh, tujuannya adalah untuk memastikan validitasnya dan menyiapkannya untuk tahap berikutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan menyesuaikannya dengan pertanyaan yang ada dalam panduan wawancara, serta memilih dan menentukan data yang relevan untuk penelitian. Di sisi lain, peneliti mengumpulkan data yang signifikan dari dari dokumen yang didapatkan agar dapat disajikan secara efektif.

2. Interpretasi Data

Pada tahap ini, data penelitian yang sudah dideskripsikan melalui narasi dan tabel diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Proses interpretasi juga melibatkan presentasi data yang berasal dari informasi-informasi yang bersifat rahasia, di mana peneliti memilih

kata-kata dengan cermat untuk menghindari kesan yang mungkin merugikan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian secara menyeluruh diuraikan dalam lampiran, dan penentuan lampiran disusun agar relevan dengan temuan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis menganalisis data berarti secara sistematis menyusun, mengintegrasikan, dan menyelidiki untuk mendapatkan pola hubungan diantara rincian spesifik (Neuman, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *coding*, reduksi, dan kesimpulan (Creswell & Poth, 2013).

1. *Coding*

Dalam Neuman (2006) dijelaskan terdapat tiga sistem *coding* dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. *Open Coding*

Pengkodean terbuka (*open coding*) adalah tahap dalam analisis data di mana peneliti mengidentifikasi, menelaah, membandingkan, mengkonseptualisasikan, dan mengelompokkan elemen-elemen yang ditemukan dalam teks dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta catatan harian peneliti..

2. *Axial Coding*

Pengodean dengan langkah awal penentuan jenis katagori kemudian dilanjutkan dengan menemukan hubungan antar katagori atau antar sub-katagori. Ini dapat menyarankan untuk menghilangkan beberapa tema atau memeriksa yang lain lebih mendalam.

3. *Selective Coding*

Selective coding (pengkodean terpilih) adalah Pengkodean tahap akhir melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh data dan kode yang telah diterapkan sebelumnya. Pada fase ini, peneliti melakukan pemindaian untuk memastikan bahwa semua data telah diperiksa, mengidentifikasi tema-tema utama, dan membandingkan informasi setelah sebagian besar data terkumpul.

2. Reduksi

Reduksi data adalah proses yang memerlukan keterampilan analitis mendalam serta wawasan yang tajam. Mengingat volume data yang besar yang diperoleh dari lapangan, penting untuk mencatatnya secara detail dan segera melakukan analisis. Proses reduksi data melibatkan merangkum, memilih informasi penting, memfokuskan pada elemen-elemen utama, serta mengidentifikasi tema dan pola. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang dikumpulkan menjadi lebih jelas dan memudahkan proses pengumpulan data selanjutnya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di awal penelitian, tetapi ada kemungkinan juga tidak sepenuhnya menjawabnya. Hal ini karena pertanyaan dalam penelitian kualitatif sering bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan.

3.8 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Penentuan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian benar-benar dilakukan dan menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penentuan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi pengamat dan triangulasi ukuran. Menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk saling melengkapi, memungkinkan pendekatan kuantitatif memberikan data statistik dan pendekatan kualitatif memberikan konteks serta kedalaman makna. Penggunaan triangulasi metode tidak hanya memperkaya data, tetapi juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan atau inkonsistensi dalam data, yang akhirnya meningkatkan validitas hasil penelitian (Neuman, 2013).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tanggamus

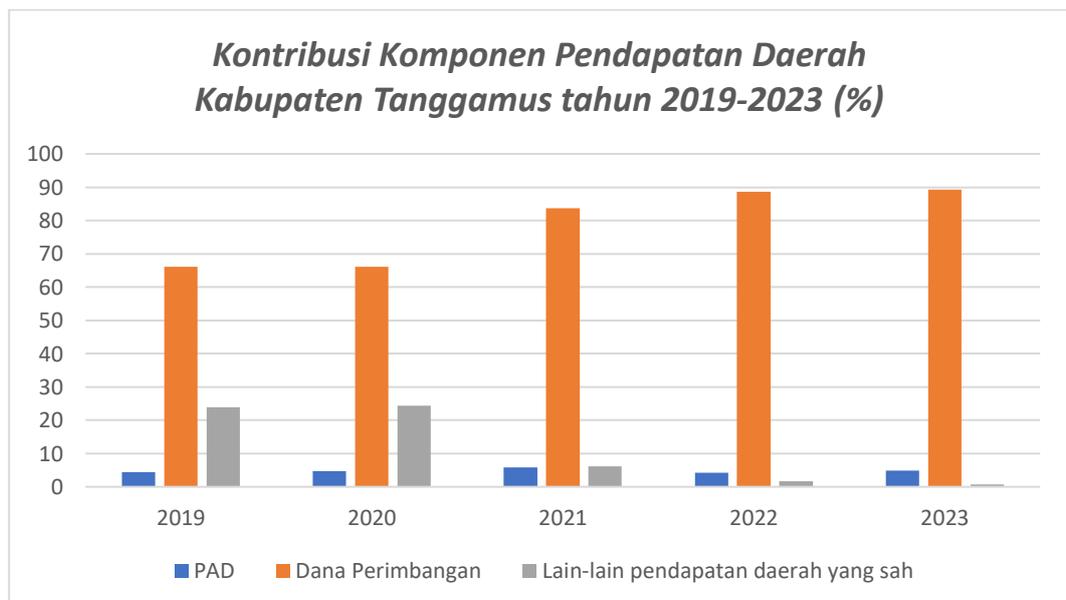
Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang memiliki luas wilayah sebesar 4.654,96 km². Kabupaten Tanggamus memiliki 2 (dua) sungai utama, kedua sungai itu adalah Way Sekampung dan Way Semangka. Selain kedua sungai utama, terdapat juga beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Tanggamus antara lain: Way Pisang, Way Gatal, Way Semah, Way Sengarus, Way Bulok dan Way Semuong.

Hal lain yang patut untuk diperhatikan berkaitan dengan keadaan wilayah Kabupaten Tanggamus adalah gunung yang berada di wilayah ini. Tercatat 5 Gunung yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus, antara lain gunung Tanggamus (2.102 m) di Kecamatan Kota Agung, Gunung Suak (414 m) di kecamatan Cukuh Balak, Gunung Pematang Halupan (1.646 m) berada di Kecamatan Wonosobo, gunung Rindingan (1.508 m) di Kecamatan Pulau Panggung dan Gunung Gisting (786 m) di Kecamatan Gisting. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanggamus selain gunung juga terdapat laut. Dimana laut Tanggamus memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terdapat 5.703 rumah tangga perikanan laut yang jumlah produksinya mencapai 41.263.434 ton.

4.2 Gambaran Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila rencana penyelenggaraan program pembangunan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (money

follow programs). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain pendapatan daerah yang Sah. Berikut kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah di Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019-2023:

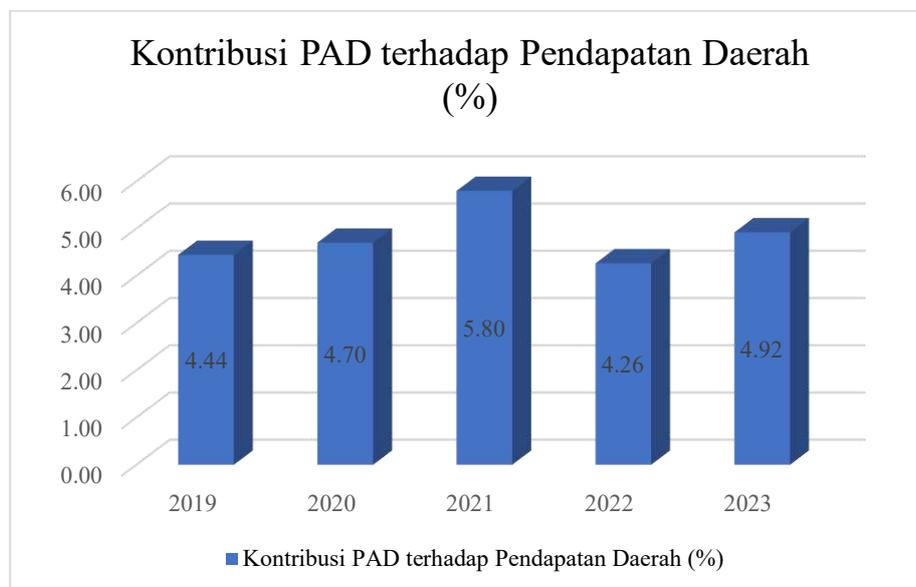


Sumber : LRA,2024

Gambar 2. Diagram Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023

Dari diagram tersebut diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus didominasi oleh Pendapatan transfer.

Komponen pendapatan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan daerah yang mandiri memiliki PAD yang mampu membiayai belanjanya sebagai konsekuensi adanya otonomi daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019-2023 terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :



Sumber : LRA,2024

Gambar 3. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2023

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun anggaran 2019-2023 mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 2021. Pada tahun 2020 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sekitar 0,3%. Selanjutnya untuk tahun 2021 kenaikan kontribusi PAD sebesar 1,10%. Kemudian pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 1,54% dan untuk tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa *trend* PAD Kabupaten Tanggamus cukup stabil.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah diperoleh dari wajib pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan. Kemudian retribusi daerah diperoleh sesuai jasa yang diberikan kepada masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain kekayaan daerah yang sah berbeda beda pada tiap tahun anggarannya.

4.2.1.1 Pajak daerah

Sumber PAD dari pajak daerah di Kabupaten Tanggamus terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Sejenisnya, Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana, Pajak Reklame, Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan, Logam dan Batuan Lainnya, PBBP2, dan BPHTB-Pemberian Hak Baru. Untuk rincian dari sumber-sumber pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Sumber pendapatan dari pajak hotel di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

Table 15. Objek Pajak Hotel

No.	Nama WP	Alamat
1	Hotel 21	Gisting
2	Wisma Hosana	Gisting
3	Hotel Gisting	Gisting
4	Hotel Pelangi	Kota Agung
5	Hotel Ratu Kuring	Gisting
6	Kontrakan Bilnata	Talang Padang
7	Wisma Osela	Kota Agung
8	Rumah Ide	Kota Agung
9	Royal Gisting Hotel	Gisting
10	Juanda Executive Residences	Kota Agung
11	Oma KJ	Gisting

Sumber : Dokumen BPKD, 2024

2. Pajak Parkir

Sumber pendapatan dari pajak parkir di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 15 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Objek Pajak Parkir

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	Butterfly Swimming Poll A.N Wardi	Gisting
2	PT. Sumber Alfaria Trijaya A.N Subekti	Tersebar Di Wil Kab Tanggamus
3	PT. Securindo Packatama Indonesia A.N Rustam Rachmad (Rsud)	Kota Agung
4	CV. Afira Husada A.N Yol Faizar Skm	Talang Padang
5	PT. Indomarco Prismaatama A.N Henry Yudi Santoso	Tersebar Di Wil Kab Tanggamus
6	Agrowisata Kopi Idaman A.N Iqbal Reza Lianda	Gisting
7	PT.Tirta Investama Tanggamus A.N Oscar Haris Pratama	Kota Agung Timur
8	PT.Bintang Kharisma Jaya A.N Joni Saputra	Gisting
9	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk A.N Septina Pujihastuti	Talang Padang
10	Gisting Hotel	Gisting
11	PT. Sentrypark Utama Indonesia (Rs Secanti)	Rs Secanti Gisting
12	Bri Kantor Cabang Pringsewu	Tersebar Di Wil Kab Tanggamus
13	Lentana Garden	Gisting
14	PT. Lingga Teknik Utama (Pasar)	Talang Padang
15	PT. Multimart No 18	Gisting

Sumber : Dokumen BPKD, 2024

3. Pajak Hiburan

Sumber pendapatan dari pajak hiburan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 3 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Objek Pajak Hiburan

NO	NAMA WP	ALAMAT
1	Ratu Kuring	Gisting
2	Rumah "I D E"	Kota Agung
3	CV. Ariestajaya	Margoyoso, Sumberejo

Sumber : Dokumen BPKD, 2024

4. Pajak Mineral bukan Logam

Sumber pendapatan dari pajak mineral bukan logam di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Objek Pajak Mineral Bukan Logam

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	PT. Wahana Tanggamus Berkah	Wonosobo
2	PT. Yudistira Tanjung Barat	Kelumbayan
3	PT. Mustika Duta Kencana	Kelumbayan
4	PT. Surya Cipta Dipa Tanggamus	Kelumbayan
5	Asan Saputra	Kota Agung Timur
6	PT. Khariti	Wonosobo
7	PT. Anugrah Jasa Bersama	Wonosobo
8	PT. Paragon Perdana Mining	Cukuh Balak
9	Hakimuddin	Pugung
10	CV. Sinar Rejeki Abadi	Pugung
11	PT. Pandu Mulia	Kelumbayan

Sumber : Dokumen BPKD, 2024

5. Pajak Air Tanah

Sumber pendapatan dari pajak air tanah di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 16 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Objek Pajak Air Tanah

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	PT. Multi Agung Sejati	Pekon Kota Agung, Kec Kota Agung
2	PT. Multi Breder Adirama Indonesia Tbk	Pekon Campang, Kec Gisting
3	PT. Windu Mantap Mandiri	Pekon Way Rilau, Kec Cukuh Balak
4	PT. Windu Mantap Mandiri	Tengor, Kec Cukuh Balak
5	PT. Sumber Windu Air Mas	Kota Batu, Kec. Kotaagung Timur, Kab. Tanggamus
6	PT. Prima Larvae	Pekon Tengor, Kec Cukuh Balak
7	PT. Jci Poultry Breeding Division	Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kab. Tanggamus
8	PT. Voda Tirta Nirwana	Pekon Batu Kramat, Kec Kota Agung Timur
9	PT. Pln (Persero) Uiksbs Bandar Lampung Ulp	Ulu Belu
10	Pabrik Arquana (CV. Sumber Makmur)	Jln. Ams Waysom Pekon Kota Agung, Kec Kota Agung - Tanggamus
11	PT. Kharisma Berkat Jaya / Spbu 24.353.47	Banjar Negeri, Kec. Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung
12	PT. Tirta Investama Tanggamus	Jln. H. Juanda Pekon Teba Rt 001,
13	PT. Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu	Jl. Taya Ulu Belu, Pekon Karang Rejo, Kec Ulubelu
14	CV. Lampung Barokah	Jl. Way Napal Dusun Rantau Tijing
15	Ud. Rita A.N Rita Sutiono	Jln. Ams Dusun Waysom Pekon Kota Agung
16	PT. Kharisma Berkat Jaya / Spbu 24.353.157	Kp. Baru, Kec. Kota Agung Tim., Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384

Sumber : Dokumen BPKD, 2024

6. Data Reklame

Sumber pendapatan dari pajak reklame di Kabupaten Tanggamus terdiri dari terbagi dalam 14 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Objek Pajak Reklame

No	Kecamatan	Objek Pajak
		PT. Bhakti Idola Tama
		Baliho Honda
		Bri Kcp Pringsewu
		CV. Caka Lampung Primedia
		CV. Dhn Sukses Mandiri
		CV. Gasing Mas
		Gudang Garam
		CV. Gunung
		CV. Hanif Mitra Lampung
		CV. Sinar Logam
		CV. Zona Multimedia
		Devis Jaya Advertising
		Hannochs Toko Murah Jaya
		Hannochs Toko Sinar Aneka
		Maryam Jamilah
		Momoyo (Ice Cream Dan Fruit Tea)
		Pod Kota Agung
		PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya
		PT. Astha Beribis Grafika
1	Kotaagung	PT. Bintang Sumatera Express (Jnt Kota Agung)
		PT. Bprs Tanggamus
		PT. Ciptatapan Dinamika
		PT. Dinamis Media Indonesia
		PT. Djabesdepo Fortuna Raya
		PT. Djarum
		PT. Elang Perdana Tyre Industry
		PT. Grand Modern Indonesia
		PT. Gree Elektrik Appliances Indonesia
		PT. Gudang Garam - Tbk
		PT. Hika Megahjaya Media / Hudha
		PT. Indofood Cbp Sukses Makmur
		PT. Kharisma Berkat Jaya Kab. Tanggamus
		PT. Lautan Teduh Interniaga Cabang Kota Agung
		PT. Nusarana Indonesia
		PT. Parama Global Inspira

No	Kecamatan	Objek Pajak
		PT. Secepat Ekspres Indonesia
		PT. Tunas Dwipa Matra
		PT. World Innovative Telecommunication
		PT. Indomarco Prismatama
		PT. Sumber Alfaria Trijaya
		Adv. Zona Multi Media
		Bela Furniture 03
		Boyment Store
		Bri Pringsewu
		CV. Caka Lampung Primedia
		CV. Caka Lampung Primedia
		CV. Caka Lampung Primedia
		CV. Gasing Mas
		Griya Gardenia Gisting
		Gudang Garam
		CV. Hanif Mitra Lampung
		CV. Jaya Bakery
		CV. Karya Tehnik Indonesia
		CV. Pelangi Mitra
		CV. Tangguh Karya Mandiri
		CV. Zona Multimedia
		Hannochs Toko Sudarso
		Hannochs Toko Harun
2	Gisting	Jnt Express Gisting
		Klinik Aeesha
		PT. Astha Beribis Grafika
		PT. Astra International Tbk. Daihatsu
		PT. Bhakti Idola Tama
		PT. Bintang Kharisma Jaya 2
		PT. Dinamis Media Indonesia
		PT. Dinamis Media Indonesia
		PT. Djabesdepo Fortuna Raya
		PT. Djarum
		PT. Indo Sinergi Komunikasi
		PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
		PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
		PT. Mega Inspirasi Sumber Sejahtera
		PT. Multimart No.18

No	Kecamatan	Objek Pajak
		PT. Nusarana Indonesia
		PT. Pixel Art Indonesia
		PT. Propan Raya Lcc
		PT. Sarana Cahaya Makmur
		PT. World Innovative Telecommunication
		Rs. Panti Secanti
		The One Advertising
		Yuliant Mahardika (Ice Cream Momoyo)
		PT. Indomarco Prismatama
		PT. Sumber Alfaria Trijaya
		Bri Pringsewu
		Bri Kcp Pringsewu
		Bri Kcp Pringsewu
		Bri Pringsewu
		Bri Kcp Pringsewu
		CV. Zona Multi Media
		CV. Akur Motor
		CV. Esme Global Indonesia
		CV. Gading Seputih
		Gasing Mas
		Gudang Garam
		CV. Gunung
		CV. Gunung Advertising
		CV. Hanif Mitra Lampung
3	Talang Padang	CV. Pelangi Mitra
		Mh. Beauty Studio
		Nsc Finance
		PT. Astha Beribis Grafika
		PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
		PT. Bhakti Idola Tama
		PT. Daya Indah Yasa
		PT. Dinamis Media Indonesia
		PT. Djarum
		PT. Indo Sinergi Komunikasi
		PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
		PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
		PT. Kalila Putri Mandiri
		PT. Nusarana Indonesia
		PT. Secepat Ekspres Indonesia

No	Kecamatan	Objek Pajak
4	Ulu Belu	PT. World Innovative Tellecommunication Ria Jaya Motor Top Man Mekar Barokah PT. Indomarco Prismatama PT. Sumber Alfaria Trijaya Bri Kcp Pringsewu Bri Pringsewu CV. Hanif Mitra Lampung CV. Jadi Poltak PT. Astha Beribis Grafika PT. Indo Sinergi Komunikasi PT. Sumber Alfaria Trijaya Bri Pringsewu Bri Pringsewu Bri Pringsewu Gasing Mas Gudang Garam CV. Hanif Mitra Lampung CV. Pelangi Mitra
5	Wonosobo	Devis Jaya Advertising PT. Djarum PT. Indo Sinergi Komunikasi PT. Lakaran Jalan Raya Wonosobo Kab. Tanggamus PT. Parama Global Inspira
6	Pulau Panggung	PT. World Innovative Telecommunication PT. Indomarco Prismatama PT. Sumber Alfaria Trijaya Bri Kcp Pringsewu Bri Kcp Pringsewu Bri Kcp Pringsewu Gasing Mas
7	Pugung	CV. Jadi Poltak CV. Pelangi Mitra PT. Darma Agung Perkasa PT. Indo Sinergi Komunikasi PT. Indomarco Prismatama PT. Sumber Alfaria Trijaya CV. Zona Multi Media

No	Kecamatan	Objek Pajak
		CV. Caka Lampung Primedia PT. Gudang Garam CV. Pelangi Mitra
		PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
		PT. Indomarco Prismaatama PT. Sumber Alfaria Trijaya CV. Caka Lampung Primedia CV. Caka Lampung Primedia Gudang Garam
8	Gunung Alip	CV. Pelangi Mitra CV. Pelangi Mitra PT. Kharisma Berkat Jaya PT. Indomarco Prismaatama PT. Sumber Alfaria Trijaya CV. Caka Lampung Primedia CV. Canvilgroup CV. Pelangi Mitra CV. Pelangi Mitra CV. Pelangi Mitra
9	Sumberejo	PT. Dinamis Media Indonesia PT. Djarum PT. Indo Sinergi Komunikasi
		PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
		PT. Kharisma Berkat Jaya PT. Indomarco Prismaatama PT. Sumber Alfaria Trijaya
10	Kota Agung Barat	Gasing Mas PT. Sumber Alfaria Trijaya CV. Jadi Poltak CV. Jadi Poltak
11	Semaka	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
		PT. Indomarco Prismaatama
12	Limau	CV. Jadi Poltak
		CV. Pelangi Mitra
13	Naningan	PT. Astha Beribis Grafika
		PT. Astha Beribis Grafika
14	Bulok	PT. Indomarco Prismaatama

Sumber : Dokumen BPKD, 2024

7. Pajak Restoran

Sumber pendapatan dari pajak restoran di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 108 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Objek Pajak Restoran

No.	Nama OP	Alamat
1	Rm. Sego Lestari	Kota Agung
2	Rm. Evi Jaya	Kota Agung
3	Kantin Berkah Bumi Jaya	Komplek Pemda
4	Kantin Selera Bunda	Komplek Pemda
5	Kantin Susi	Komplek Pemda
6	Kantin Plamboyan	Komplek Pemda
7	Kantin Lingkungan Hidup	Komplek Pemda
8	Bakso Mentari	Pekon Tekad Pulau Panggung
9	Rm. Monggo Moro	Pekon Tekad Pulau Panggung
10	Rm. Wong Solo	Pekon Tekad Pulau Panggung
11	Rm. Sederahana	Pekon Tekad Pulau Panggung
12	Rm. Pondok Daun	Jl. Raden Intan Talang Padang Pekon Talang Padang
13	Rm. Ampera	Jl. Raya Talang Padang Pekon Talang Padang
14	Rm. Minang Siang Malam	Jl. Raya Gisting Bawah, Kompleks Pasar
15	Rm. Sate Setia	Jl. Raya Gisting Bawah
16	Rm. Mas Pendek	Jl. Raya Gisting Bawah, Kec. Gisting
17	Rm. Satiyem	Gisting Atas
18	Bakso Ninuk	Kota Agung
19	Rm. Sederhana 1	Dusun Waysom, Pekon Kotaagung Kampung
20	Bakso Ninuk	Jl. Ir. Hi. Djuanda Kuripan Kotaagung
21	Rm. Langgeng	Jl. Kotaagung - Bengkunt No. 160 Wonosobo Kab. Tanggamus
22	Cetering Cik Wo	Jl. Sabah Luppak No.59 Kuripan
23	Cetring Melati	Jl. Kh. Ahmad Dahlan No 200 Banjar Negeri
24	Cetring As.Sifa	Pekon Purwodadi
25	Rm. CV. Anisa	Jl. Ir. Hi. Djuanda Pekon Teba
26	Kantin Amelata	Komplek Pemda
27	Rm. Ratu Kuring	Jl. Raya Gisting Bawah, Pekon Banjar Manis
28	Cetring Anugrah	Jl. Raya Gisting Bawah, Kompleks Pasar
29	Rm. Doni Gendut	Kota Agung Timur
30	Rumah Makan Nusantara	Jl. Raya Gisting Atas Blok 18 Gisting Atas

No.	Nama OP	Alamat
31	Raja Sambel Mang Dodo	Jl. Ir. Hi. Djuanda Pekon Terbaya Kotaagung
32	Rm. CV. Savana	Jl. Ir. Hi. Djuanda Gg. Penlongan Pekon Kagungan
33	Cetring Dapur Mawar	Jl. Gang Rambutan Pekon Tekad Pulau Panggung
34	Catering Bumdes Mandiri Bersatu Catering G L	Jl. Raya Gisting Bawah Dsn 2a Blok 4
35	Kantin Eka Pol Pp	Kompleks Pemda Kabupaten Tanggamus
36	Rm. Iwan Ane	Kota Agung
37	Rm. Dapur Maryam	Kota Agung
38	Cetring Umini	Pekon Dadapan Pekon Sumberejo
39	Rm. Kartini	Jl. Raya Gisting Bawah Depan Rest Area
40	Rm. Pondok Bambu	Kota Agung
41	Kantin Afika	Komplek Pemda
42	Kantin Ayam Geprek	Komplek Pemda
43	Rm. Cak Arek	Kota Agung
44	Kantin Suai	Kmpleks Pemda Kabupaten Tanggamus
45	Danau Gumanti 2	Jl. Balimbing Kotaagung, Pedukuhan Waysom
46	Rm. Bakso Ateng	Kota Agung
47	Rm. Mas Legi	Kota Agung
48	Kantin Bila	Komplek Pemda
49	Kantin Robusta	Komplek Pemda
50	Kantin Saka	Komplek Pemda
51	Rm. Buana	Pekon Rantau Tijang
52	Cetring Orlin	Jl. Mess Pemda Gisting Bawah
53	Bukit Idaman	Gisting Atas Blok 7. Kec,Gisting
54	Rm. Danau Gumanti	Jl. Raya Gisting Bawah, Kec. Gisting
55	Rm. Saung Bangkit	Jl. Samudra No. 01 Ps Madang
56	CV. Jember Jaya Pratama	Jl, Srikadi, Baros Kec. Kotaagung
57	Bakso Goyang Lidah (Mas Ateng)	Jl. Merdeka, Ps. Madang, Kec. Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384
58	Iwan Galau	Kelurahan, Baros, Kec. Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384
59	Telago Minang	Jl. Merdeka, Kuripan, Kec. Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384
60	Rm . Mba Sur	Pekon Batu Keramat
61	Kantin Makmur Tanggamus	Komplek Pemda
62	Soto Lamongan	Sedayu Rt/Rw 002/001 Kecamatan Semaka
63	Rm. Pasundan	Gisting Atas
64	Rm. Lentana Garden	Gisting Atas
65	Jaya Bakeri	Jl. Raya Gisting Bawah, Kecamatan Gisting

No.	Nama OP	Alamat
66	CV. Putri Lampung Mandiri	Kuripan Rt/Rw 001/001
67	Waroeng Cafe Gendhis	Kota Raja Talang Padang
68	Kantin UGI PU	Kompleks Pemda
69	Catering Ratna	Rantau Tijang, Kecamatan Pugung
70	Saung Bagja	Jl. Ir. Hi. Juanda, Kampung Bayur, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus
71	Catering Dapur Kiay	Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung
72	Story Cafe	Gisting Atas
73	Kantin Berkah	Kompleks Pemda Kabupaten Tanggamus
74	Lesehan Idaman	Bumiagung, Kel. Kuripan
75	PT.Pangansari Utama	Jl.Raya Poncol No. 24 Kel. Ciracas, Kec.Ciracas, Kota Adm Jakarta Timur
76	Rizky Cookies & Cake	Kuta Dalam Rt/Rw 005/002
77	Pkk Cukuh Balak	Dusun Semberangan Pekon Doh
78	Kantin Idaman	Kompleks Pemda Kabupaten Tanggamus
79	Alifa Catering	Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kotaagung Barat
80	Bakso Baper	Landsbau Kelurahan Landsbau, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus
81	Catering Jessica Cake	Dusin Sumber Mulya Sumberejo
82	Kantin Ngay Fitri	Komplek Pemda Kab. Tanggamus
83	Rm. Muara Indah	Pantai Muara Indah, Kelurahan Baros, Kecamatan Kotaagung
84	Kedai Jagad	Bumi Agung Rt/Rw 016/006 Kel. Kuripan, Kotaagung
85	Dapoer Okan	Gisting Atas Rt/Rw 002/002
86	Angkringan Joglo	Jl. Putri Madang Kusa
87	Kantin Zevana	Kompleks Pemda Kabupaten Tanggamus
88	Catering Ahon	Jl. Merdeka, Kuripan, Kec. Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung 35384
89	Kantin Hakiki	Kompleks Pemda Kab. Tanggamus
90	CV. Kirti Tama Wisesha	Jl.Ir.Juanda Way Kamal No. 011 Rt/Rw 004/004 Pekon Negeri Ratu
91	Rm. Yoga	Pekon Suka Merindu, Kec. Talang Padang
92	Bakso Wahyu	Gisting Atas Kabupaten Tanggamus
93	Cafe Retro Resto	Dusun 3 Blok 1 Gisting Bawah
94	Cibho Cetring	Campang Rt/Rw 008/004 Kel. Campang, Kec. Gisting
95	Ikan Bakar Ibu Nanik	Datarajan Blok 1 Ulubelu
96	PT. Tata Wisata	Gunung Doh
97	Momoyo Es Krim And Fruit Tea	Jl. Raya Gisting Bawah, Gisting Kab. Tanggamus
98	Dapoer Mak Wo	Asrama Polsek Kotaagung

No.	Nama OP	Alamat
99	Omah Cafe Gista	Blok 13, Kel. Gisting Atas, Kec. Gisting, Tanggamus
100	Momoyo Es Krim And Fruit Tea	Jl.Ir.Hi.Juanda Kuripan, Kotaagung
101	Rm.Sederhana Bulok	Rantau Jaya, Pematang Nebak
102	Bfc Mincang	Mincang Atas Rt/Rw 001/005
103	Selero Minang Gisting	Gisting Bawah
104	Yumna's Kitchen	Pekon Talang Rejo, Kotaagung Timur
105	Catering Pekon Unggak	Pekon Unggak, Kelumbayan
106	Rm. Sederhana Mas Eko	Pekon Batu Keramat, Kotaagung Timur
107	Ayam Bakar Mas Gendut	Jl. Raya Gisting Bawah, Gisting Bawah, Tanggamus
108	Catering Sriyani	Dusun Sriyani 01

Sumber: Dokumen BPKD, 2024

4.2.1.2 Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari komponen Retribusi Daerah di Kabupaten Tanggamus terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penetapan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut rincian sumber retribusi daerah di Kabupaten Tanggamus:

Tabel 22 Sumber Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pemakaian Ruangan	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
Retribusi Kios	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Pembudidayaan Ikan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya diLingkungan Terminal	
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	

Sumber : LRA Kabupaten Tanggamus, 2024

4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga ditampung ke dalam pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan di Kabupaten Tanggamus berupa Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

4.2.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Sumber PAD Kabupaten Tanggamus dari komponen lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

1. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
2. Jasa Giro pada Kas Daerah
3. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kerjaan
6. Pendapatan Denda Pajak
7. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

8. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
9. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
10. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
11. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga
12. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Partai Politik
13. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
14. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
15. Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat
16. Potongan Tim PHO
17. Pendapatan Pelayanan Kesehatan di PKM
18. Pendapatan BLUD
19. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

4.3 Gambaran Umum Lembaga Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus meyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan Aset Daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus termasuk Badan Daerah Kabupaten yang bertipe A yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator JF Perencanaan , dan Sub Koordinator JF Keuangan.
2. Bidang Penetapan, Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari Sub Bidang Penetapan, Sub Bidang Pendataan, dan Sub Koordinator JF Pembukuan dan Pelaporan.
3. Bidang Penerimaan, Evaluasi dan Pengendalian terdiri dari Sub Bidang Penerimaan & Keberatan, Sub Bidang Evaluasi Pendapatan, dan Sub Koordinator JF Pengendalian Pendapatan Daerah.
4. Bidang Anggaran terdiri dari Sub Bidang Koordinasi Anggaran, Sub Bidang Penyusunan Anggaran, dan Sub Koordinator JF Kebijakan Anggaran.
5. Bidang Perbendaharaan terdiri dari Sub Bidang Kebijakan Belanja dan Pengelolaan Kas Daerah, Sub Bidang Pengelolaan Belanja, dan Sub Koordinator JF Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
6. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Pendapatan , Sub Bidang Akuntansi Belanja, dan Sub Koordinator JF Pelaporan Keuangan .

7. Bidang Aset Daerah terdiri dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Monitoring, Sub Koordinator JF Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah.

Pengelolaan PAD di Kbaupaten Tanggamus menjadi tugas dan tanggung jawab bidang Penetapan, Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanggamus terkait anggaran tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2019-2023 pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus masih didominasi oleh dana perimbangan. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanggamus dibiayai menggunakan dana perimbangan yang menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerahnya masih tinggi dan kemandirian keuangan daerahnya masih rendah hal ini mengartikan bahwa PAD Kabupaten Tanggamus masih rendah. Sebagaimana menurut Halim faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD di Kabupaten Tanggamus, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah menjadi faktor rendahnya PAD karena realisasi PAD Kabupaten Tanggamus tidak pernah mencapai target, menunjukkan kebijakan belum efektif. Fokus anggaran lebih condong pada belanja daripada optimalisasi pendapatan, dengan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penggalan potensi PAD.
2. Efisiensi administratif menjadi salah satu faktor karena ketiadaan OPD khusus pengelola PAD, minimnya SDM yang kompeten, dan rendahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan efisiensi administrasi pemungutan PAD sangat lemah. dan rasio desentralisasi fiskal tergolong sangat rendah.
3. Pemanfaatan teknologi menjadi faktor penyebab rendahnya PAD karena sistem digital telah tersedia, seperti e-payment dan SMART GOV, namun pemanfaatannya belum optimal. Banyak perangkat tidak digunakan, dan tidak ada evaluasi berkala, ditambah resistensi dari pelaku usaha terhadap sistem digital.

4. Kondisi sosial partisipasi masyarakat menjadi faktor penyebab rendahnya PAD karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih rendah. Masyarakat kurang sadar dan kurang merasa memiliki kewajiban membayar pajak, sehingga efektivitas PAD menurun, terlebih saat kondisi ekonomi menurun akibat pandemi..
5. Potensi ekonomi daerah menjadi faktor penyebab rendahnya PAD karena potensi pariwisata dan ekonomi lokal belum tergarap maksimal akibat keterbatasan infrastruktur, promosi, dan keamanan. Kontribusi sektor unggulan terhadap PAD masih sangat rendah karena belum ada strategi pengelolaan yang terintegrasiserta adanya image buruk yang berkaitan dengan budaya masyarakat.

Dari faktor-faktor tersebut, penulis mengelompokkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rendahnya PAD Kabupaten Tanggamus. Faktor internal yang mempengaruhi rendahnya PAD Kabupaten Tanggamus adalah kebijakan pemerintah dan efisiensi administratif. Kemudian faktor eksternalnya adalah kondisi sosial partisipasi masyarakat dan potensi ekonomi daerah. Untuk pemanfaatan teknologi dapat termasuk kedalam faktor internal dan eksternal, karena dalam pemanfaatan teknologi dibutuhkan pengawasan dari pemerintah pada tahap pelaksanaannya, selain itu dari subjek pajaknya juga harus mendukung untuk penerapan teknologi tersebut. Sehingga pemanfaatan teknologi dapat digolongkan kedalam faktor internal dan eksternal.

Kesimpulan dari faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh dalam rendahnya PAD di Kabupaten Tanggamus adalah kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat, karena menurut penulis kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan besaran PAD yang akan diperoleh suatu daerah. Selain itu, kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat juga menentukan apakah pelaksanaan pemungutan PAD dapat maksimal atau tidak maksimal. Kemudian untuk faktor yang kurang berpengaruh menurut penulis dalam hal ini adalah efisiensi administratif, karena didalam faktor administrasi pada jaman sekarang sudah dapat dibantu dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Permasalahan SDM yang kurang mumpuni dapat terbantu dengan kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan PAD untuk kedepannya. Beberapa saran tersebut sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terkait regulasi tentang PAD disesuaikan dengan potensi ekonomi yang ada termasuk dengan perkembangan industri kreatif.
2. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur daerah terkait Keuangan daerah khususnya pendapatan daerah untuk mendukung dibentuknya dinas atau badan khusus yang menangani pendapatan daerah. Dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga keuangan pusat seperti Kementerian Keuangan melalui pelatihan.
3. Mengembangkan potensi yang sudah dikelola menjadi lebih baik, contohnya sektor pariwisata dengan mendukung infrastruktur yang memadai dan promosi daerah dengan memanfaatkan media sosial yang lebih menarik sehingga lebih banyak wisatawan yang berkunjung.
4. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Swasta dengan menggali peluang kemitraan strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset daerah.
5. Edukasi dan sosialisasi dengan mengadakan kampanye edukasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah. Dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung maupun melalui media sosial atau dengan bekerja sama dengan pihak terkait seperti KPPN untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah.
6. Pemberian reward kepada Wajib Pajak Taat dengan memberikan penghargaan, diskon, atau insentif lainnya kepada masyarakat dan pelaku usaha yang rutin membayar pajak dan retribusi tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Creswell, J., & Poth, C. (2013). *Qualitative Inquiry Research Design. Dalam Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haniz, N. F., & Sasana, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. *Diponegoro Journal Of Economics*, 3(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Kurniawan, A. (2019). Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung). Dalam Andy Kurniawan/ *JIAP* (Vol. 5, Nomor 1).
- Latifah Humairah, U., & Negeri Bandung, P. (2021). *Analysis of Parking Retribution Management As a Regional Revenue Increase Strategy (Case Study on The Regional Government of Bandung City)* Endah Dwi Kusumastuti Iyeh Supriatna. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466–479. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002a). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2002b). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Neuman, W. L. (2006). *Basics of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches (second)*.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th Edition (7 ed.)*.
- Prakoso. (2005). Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UUI Press.
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., Kudhani, E. Y., Ekonomika, F., Bisnis, D., Satya, K., Koresponden, W., Kunci, K., & Asli, P. (t.t.). Dekat Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018 (Vol. 1, Nomor 1). <https://ejournal.uksw.edu/dekat>
- Rezki, M., Inggawati, D., Optimalisasi, S., Daerah, R., Rangka, D., Pendapatan, M., Daerah, A., Pasar, D., Sleman, K., & Dan Muhtar, N. (t.t.). Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman).
- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia". Yogyakarta.
- Sriyana, J. (1999). Hubungan Keuangan Pusat-daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Economic Journal of Emerging Markets*, 4(1).
- Susilawati. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. 1(1).
- Tahwin, M., (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Tinggi, S., & Ekonomi "yppi" Rembang, I.
- Wantara, A. (1997). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta (1970 – 1992). *Kinerja – Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2, 41–60.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang. Indonesia: Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.333/42/08/2023 Tentang Efisiensi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023

Lain-Lain :

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanggamus